



## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

---

RENCANA-AKSI-PENERAPAN-SPM

2025

PERGUB GORONTALO NO. 23, BD 2025/NO.23,: 86 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK : - bahwa standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Dasar hukum pembentukkan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, Permendagri No. 59 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubenur ini memuat tentang Ketentuan Umum, Pendataan Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data, Inetgaris SPM, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 6 Oktober 2025.  
- Peraturan Gubernur ini terdiri dari 86 halaman